

LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI CIKARANG
PERIODE APRIL– JUNI 2022



PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II
TAHUN 2022

LEMBAR PENGESAHAN


LAPORAN

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN DI PENGADILAN NEGERI CIKARANG KELAS II PERIODE APRIL – JUNI 2022

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017

Disahkan di Cikarang
Pada Hari Jumat, 1 Juli 2022

Manager Reprerentative



ASYROTUN MUGIASTUTI, S.H., M.H.

Ketua Tim Survei



HUSNA MACHMUD, S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri Cikarang



EDDY DAULATTA SEMBIRING, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud Dan Tujuan.....	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja.....	3
BAB II	4
METODOLOGI	4
2.1. Metode Penelitian	4
2.2. Populasi Dan Sampel	4
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis.....	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control.....	4
2.5. Teknik Analisis Data	5
2.6. Tahapan pelaksanaan	5
BAB III	8
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	8
3.1. Profil responden	8
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator	13
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan.....	20
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan.....	21
BAB IV	26
PENUTUP	26
4.1. Kesimpulan.....	26
4.2. Rekomendasi	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2025 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait peningkatan kualitas pelayanan publik dengan sumber daya manusia yang berintegritas.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- h) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya

- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan atau data minimal 90 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Ketua Pengadilan). Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, untuk memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar Sarjana Strata Satu yaitu sejumlah 42 (empat puluh dua) orang atau sebesar 76,36%.

Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden

Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	SD	0	0
2	SMP	0	0
3	SLTA	6	10,90
4	DIPLOMA	1	1,81
5	S1	42	76,36
6	S2	6	10,90
7	S3	0	0
	Total	55	100



3.1.2. Pekerjaan responden

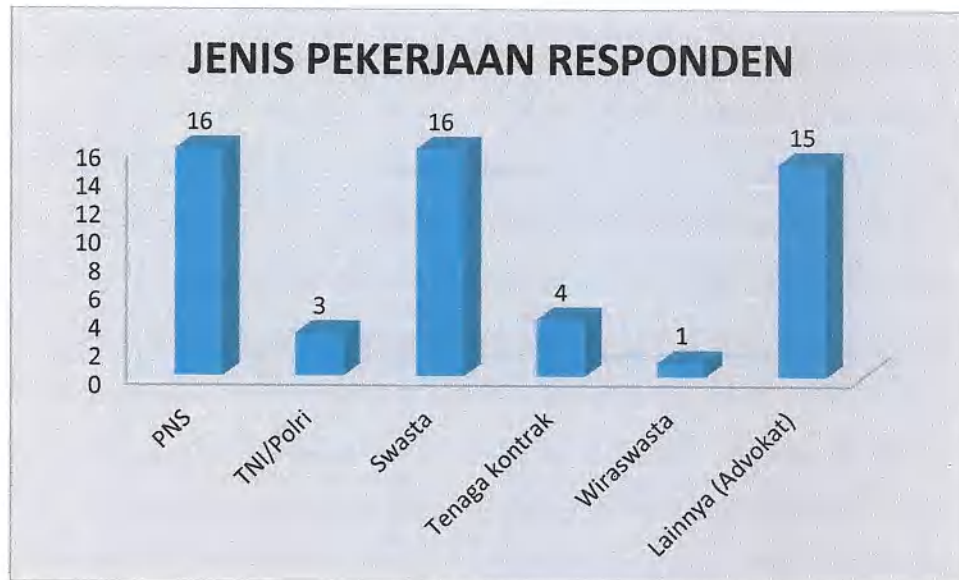
Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang jenis pekerjaan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki pekerjaan sebagai PNS dan Swasta yaitu sejumlah masing-masing 16 (enam belas) orang atau sebesar 29,09%.

Tabel 5.

Jenis pekerjaan responden

Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	PNS	16	29,09
2	TNI/Polri	3	5,45
3	Swasta	16	29,09
4	Tenaga kontrak	4	7,27
5	Wiraswasta	1	1,81
6	Lainnya (Advokat)	15	27,27
	Jumlah	55	100



3.1.3. Domisili Responden

Dari sisi domisili responden, menunjukkan bahwa sebesar 89,09% atau sejumlah 49 (empat puluh sembilan) responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Cikarang berdomisili di Jawa Barat.

Tabel 6.
Domisili responden
Responden menurut domisili

No	Domisili	Frekuensi	%
1	DKI Jakarta	6	10,90
2	Jawa Barat	49	89,09
3	Jawa Tengah	0	0
4	Jawa Timur	0	0
5	Banten	0	0
6	Lainnya	0	0
	Jumlah	55	100



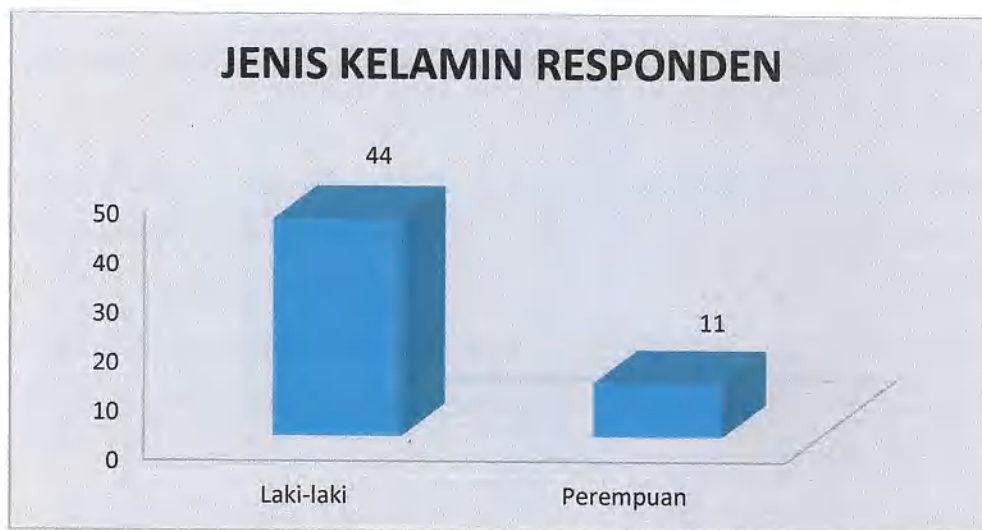
3.1.4. Jenis Kelamin

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik mayoritas pada penelitian ini berjenis kelamin laki-laki sebesar 80% atau sejumlah 44 (empat puluh empat) orang.

Tabel 7.
Jenis Kelamin

Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki-laki	44	80,00
2	Perempuan	11	20,00
Jumlah		55	100



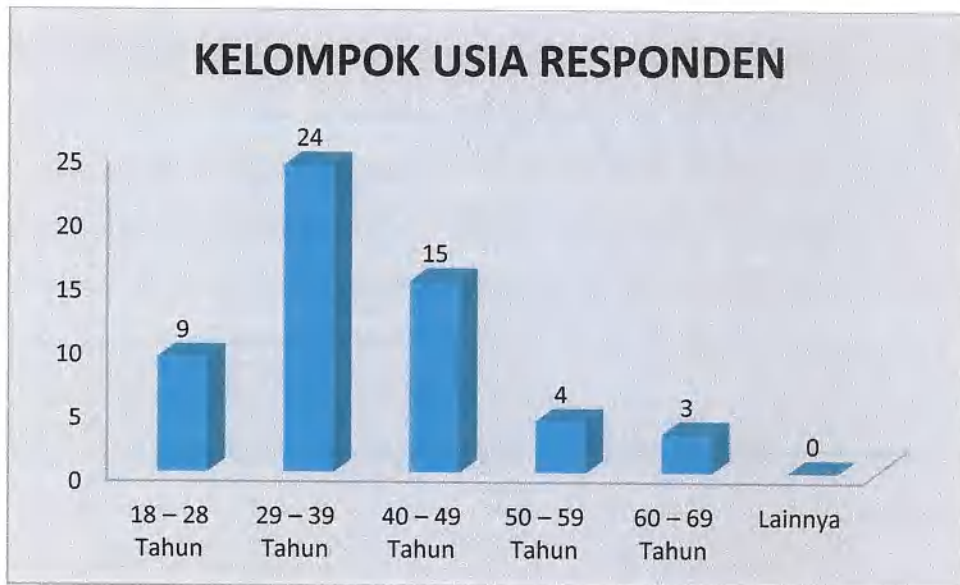
3.1.5. Kelompok usia responden

Dari segi usia responden, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Cikarang berada pada kelompok usia 29 – 39 Tahun sebesar 43,63% atau sejumlah 24 (dua puluh empat) orang.

Tabel 8.
Kelompok usia

Responden menurut kelompok usia

No	Kelompok Usia	Frekuensi	%
1	18 – 28 Tahun	9	16,36
2	29 – 39 Tahun	24	43,64
3	40 – 49 Tahun	15	27,27
4	50 – 59 Tahun	4	7,27
5	60 – 69 Tahun	3	5,45
6	Lainnya	0	0
Jumlah		55	100



3.1.6. Layanan yang digunakan responden

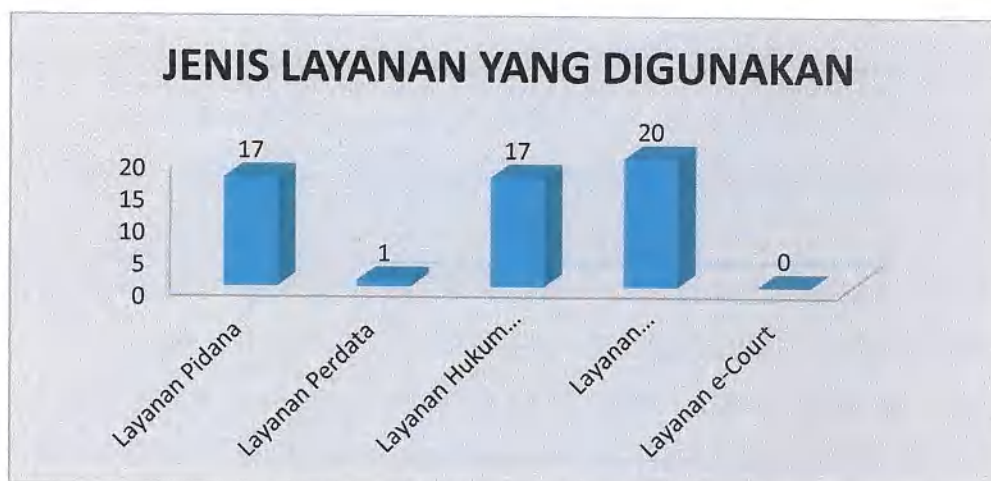
Dari sisi layanan yang digunakan oleh responden, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Cikarang menggunakan Layanan Administrasi Umum sebesar 36,36% atau sejumlah 20 orang.

Tabel 9.

Jenis layanan yang digunakan

Layanan yang digunakan responden

No	Jenis layanan	Frekuensi	%
1	Layanan Pidana	17	30,90
2	Layanan Perdata	1	1,81
3	Layanan Hukum / Informasi	17	30,90
4	Layanan Administrasi Umum	20	36,36
5	Layanan e-Court	0	0
	Jumlah	55	100



3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

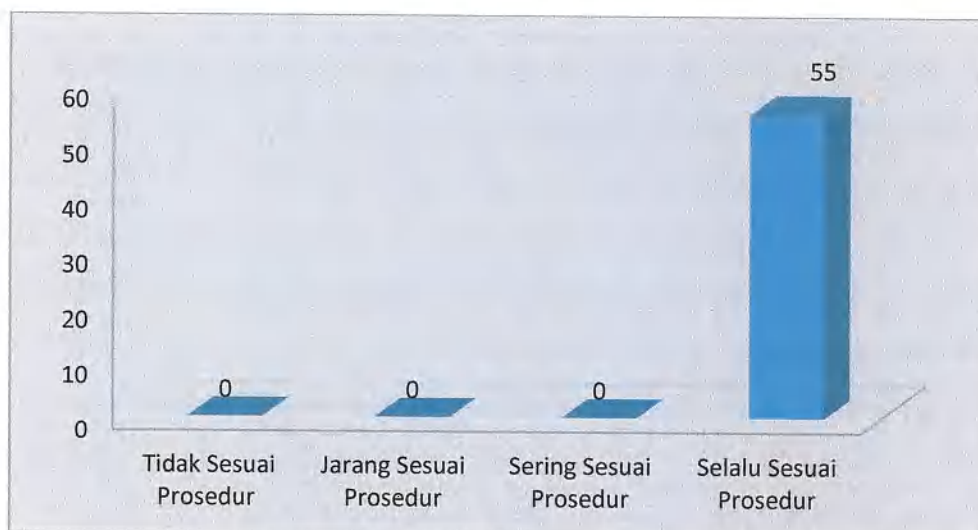
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 4,000, yaitu sebanyak 55 (lima puluh lima) responden atau sebesar 100% menyatakan selalu sesuai prosedur.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari manipulasi peraturan;

Tabel 10.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan

No.	Skor	Manipulasi Peraturan	Frekuensi	
			f	%
1.	1	Tidak Sesuai Prosedur	0	0
2.	2	Jarang Sesuai Prosedur	0	0
3.	3	Sering Sesuai Prosedur	0	0
4.	4	Selalu Sesuai Prosedur	55	100,00
Jumlah			55	100



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 4,000, yaitu sebanyak 55 (lima puluh lima) responden atau sebesar 100% menyatakan tanpa meminta imbalan.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari penyalahgunaan jabatan

Tabel 11.
Indeks pada penyalahgunaan jabatan

No.	Skor	Penyalahgunaan Jabatan	Frekuensi	
			f	%
1.	1	Selalu Meminta Imbalan	0	0
2.	2	Sering Meminta Imbalan	0	0
3.	3	Jarang Meminta Imbalan	0	0
4.	4	Tanpa Meminta Imbalan	55	100,00
Jumlah			55	100



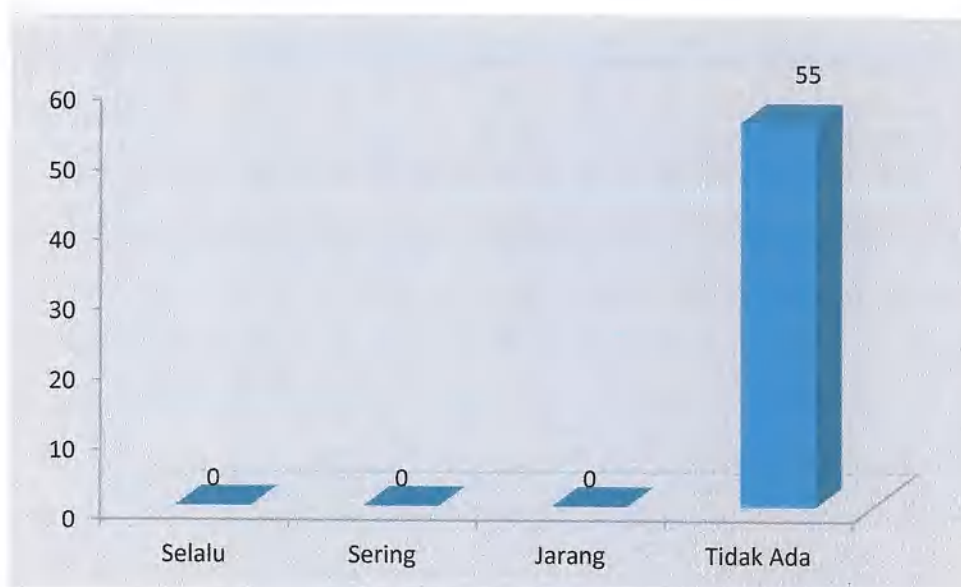
3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 4,000, yaitu sebanyak 55 (lima puluh lima) responden atau sebesar 100% menyatakan tidak ada.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak menjual pengaruh

Tabel 12.
Indeks pada indikator menjual pengaruh

No.	Skor	Menjual Pengaruh	Frekuensi	
			f	%
1.	1	Selalu	0	0
2.	2	Sering	0	0
3.	3	Jarang	0	0
4.	4	Tidak Ada	55	100,00
Jumlah			55	100



3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

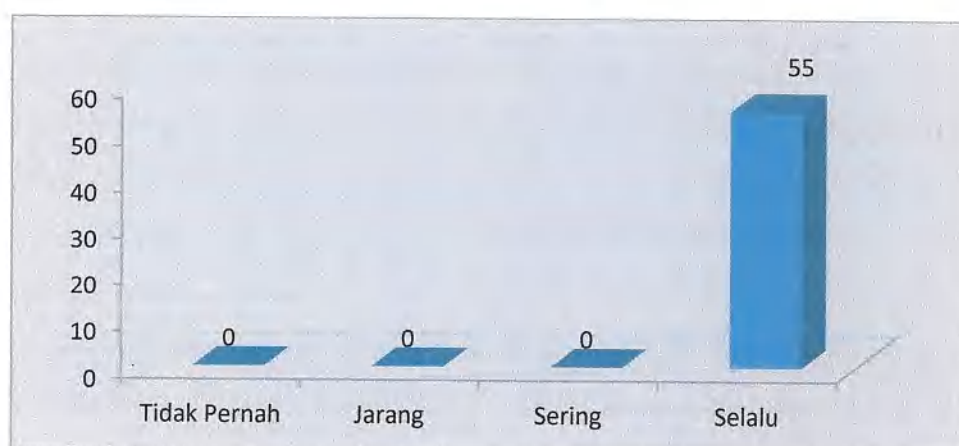
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 4,000, yaitu sebanyak 55 (lima puluh lima) responden atau sebesar 100% menyatakan selalu mudah mendapat informasi tarif/biaya.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan sangat mudah untuk mengakses transaksi dalam hal biaya;

Tabel 13.

Indeks pada indikator transparansi biaya

No.	Skor	Transparansi Biaya	Frekuensi	
			f	%
1.	1	Tidak Pernah	0	0
2.	2	Jarang	0	0
3.	3	Sering	0	0
4.	4	Selalu	55	100,00
Jumlah			55	100



3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

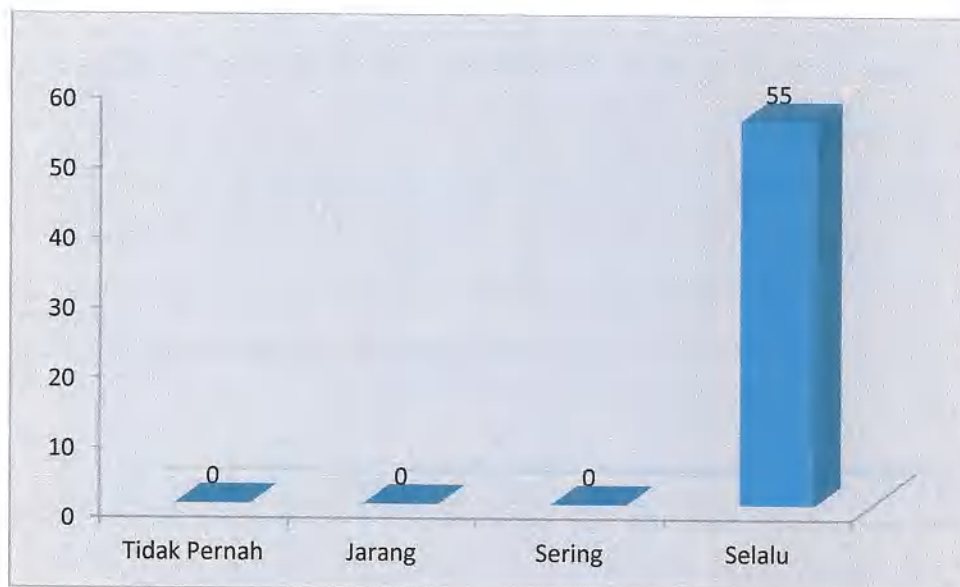
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 4,000, yaitu sebanyak 55 (lima puluh lima) responden atau sebesar 100% menyatakan selalu membayar sesuai tarif resmi.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak memungut biaya tambahan.

Tabel 15.

Indeks pada indikator tambahan biaya

No.	Skor	Tambahan biaya	Frekuensi	
			f	%
1.	1	Tidak Pernah	0	0
2.	2	Jarang	0	0
3.	3	Sering	0	0
4.	4	Selalu	55	100,00
Jumlah			55	100



3.2.6. Indikator Hadiah

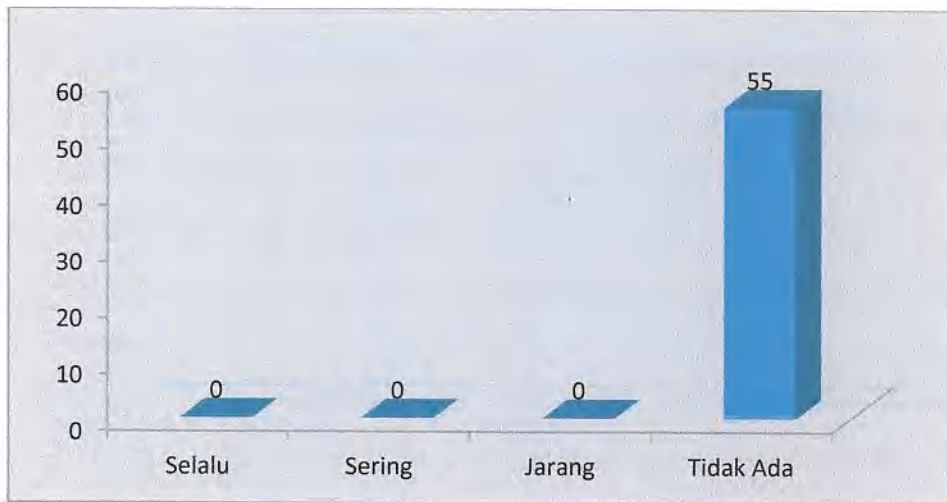
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 4,000, yaitu sebanyak 55 (lima puluh lima) responden atau sebesar 100% menyatakan tidak ada yang memberikan tanda terima kasih.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak menerima hadiah atas pelayanan.

Tabel 16.

Indeks pada indikator hadiah

No.	Skor	Indikator Hadiah	Frekuensi	
			f	%
1.	1	Selalu	0	0
2.	2	Sering	0	0
3.	3	Jarang	0	0
4.	4	Tidak Ada	55	100,00
Jumlah			55	100



3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 4,000, yaitu sebanyak 55 (lima puluh lima) responden atau sebesar 100% menyatakan selalu menerima bukti transaksi pembayaran yang sah.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan telah melakukan transparansi pembayaran.

Tabel 17.

Indeks pada indikator transparansi pembayaran

No.	Skor	Transparansi Pembayaran	Frekuensi	
			f	%
1.	1	Tidak Pernah	0	0
2.	2	Jarang	0	0
3.	3	Sering	0	0
4.	4	Selalu	55	100,00
Jumlah			55	100



3.2.8. Indikator Percaloan

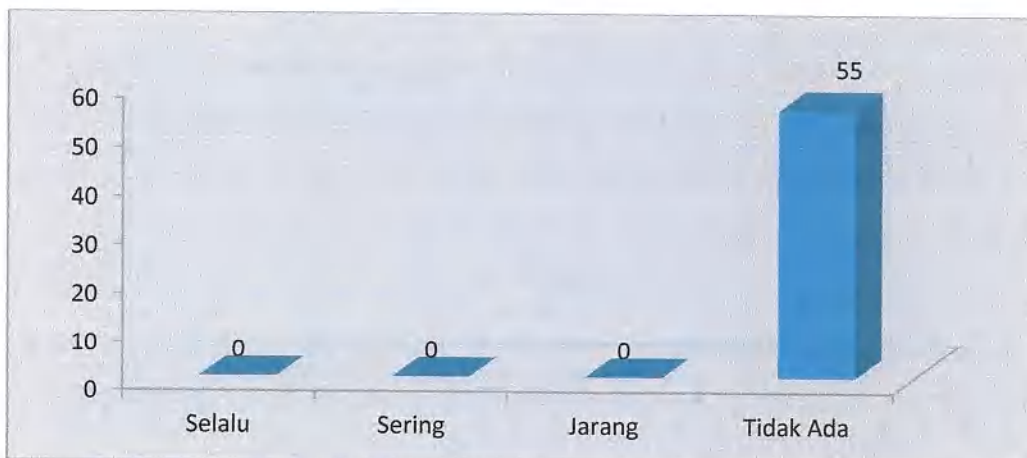
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 4,000, yaitu sebanyak 55 (lima puluh lima) responden atau sebesar 100% menyatakan tidak ada yang pernah mengetahui praktek percaloan dalam pengurusan layanan.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari tindakan Percaloan.

Tabel 18

Indeks pada indikator percaloan

No.	Skor	Indikator Percaloan	Frekuensi	
			f	%
1.	1	Selalu	0	0
2.	2	Sering	0	0
3.	3	Jarang	0	0
4.	4	Tidak Ada	55	100,00
Jumlah			55	100



3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 3,98, yaitu sebanyak 54 (lima puluh) responden atau sebesar 98,18% menyatakan tidak ada yang pernah melihat atau mendengar masih terjadi praktek KKN.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak melakukan perbuatan curang.

Tabel 19.

Indeks pada indikator perbuatan curang

No.	Skor	Perbuatan Curang	Frekuensi	
			f	%
1.	1	Selalu	0	0
2.	2	Sering	0	0
3.	3	Jarang	1	1,81
4.	4	Tidak Ada	54	98,18
Jumlah			55	100



3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4,000, yaitu sebanyak 55 (lima puluh lima) responden atau sebesar 100% menyatakan tidak ada yang pernah mengurus perkara melalui aparaturnya pengadilan.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan tidak melakukan transaksi rahasia.

Tabel 14.

Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia

No.	Skor	Transaksi Rahasia	Frekuensi	
			f	%
1.	1	Selalu	0	0
2.	2	Sering	0	0
3.	3	Jarang	0	0
4.	4	Tidak Ada	55	100,00
Jumlah			55	100



3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Cikarang sebesar **3,99**;

Tabel 20.

Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Cikarang

No	Ruang Lingkup	Rata-Rata Skor	Peringkat
1	Perbuatan Curang	3.98	10
2	Manipulasi Peraturan	4,00	9
3	Penyalahgunaan Jabatan	4,00	8
4	Menjual Pengaruh	4,00	7
5	Transparansi Biaya	4,00	6

5	Transparansi Biaya	4,00	6
6	Biaya Tambahan	4,00	5
7	Hadiah	4,00	4
8	Transparansi Pembayaran	4,00	3
9	Percaloan	4,00	2
10	Transaksi Rahasia	4,00	1

Indeks **3,99** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **99,95** (81.26 – 100.00);

Tabel 21.

Nilai Persepsi Korupsi

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Cikarang

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 18.
Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan
Kerja pada pengadilan

1	Yayat R-401915-IPAK-8083542CF5 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Pelayanan terbaik
2	Andriyani R-401915-IPAK-AC0038B797 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Tetap Selalu berikan yang terbaik bagi pengguna pelayanan
3	Paino R-401915-IPAK-9A23995293 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Pelayannya bagus dan selalu ramah
4	Rahman Arip R-401915-IPAK-D4F376FC77 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Berharap slalu ada kontrol dan penilaian serta reward thdp semua pekerja biar bisa selalu meningkatkan kualitas dan kuantitasnya,,
5	Rico R-401915-IPAK-81692D9951 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Tetap menjadi pelayanan yang terbaik
6	Dina R-401915-IPAK-A392322F27 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Pelayanan dibagian umum sangat ramah dan sopan
7	Dani Ardhia Wardana R-401915-IPAK-0B92FDCAB2 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Pelayanan yang sangat baik
8	Muhammad Iqbal R-401915-IPAK-295AFB1D19 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Pelayanan terbaik
9	Abdul R-401915-IPAK-A1D459E057 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Sangat sopan dan baik
10	Dodo Ridwan R-401915-IPAK-9A9B80FF49 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Pelayanan pada bagian pidana bagus
11	Edna R-401915-IPAK-7E990D5D74 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	sudah baik semoga dapat dipertahankan
12	Benny R-401915-IPAK-4D7A00D406 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Pelayanan sangat baik dan bagus
13	Haris R.P R-401915-IPAK-962CDC8026 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Sudah sangat bagus
14	Ismail Arifin R-401915-IPAK-3B4E3FB00A PENGADILAN NEGERI CIKARANG	PN CIKARANG LUAR BIASA
15	Supandi Darmawan R-401915-IPAK-46B8BDD0B0 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Pelayanan terbaik
16	Septerina R-401915-IPAK-8D84114C25 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Pelayanannya baik

17	Andriyani R-401915-IPAK-4499D5E515 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Tetap melayani dengan sebaik baiknya
18	Gunawan Wicaksono SH R-401915-IPAK-344BBD2ED7 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Tetap semangat dalam pelayanan
19	Gunawan Wibisono SH R-401915-IPAK-A9BA296E88 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Sangat bagus
20	Mustika R-401915-IPAK-C902E97ABC PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Pelayanan umum tanggap sekali
21	Wahyu Haryadi R-401915-IPAK-7569160D15 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Semoga selalu ada perbaikan
22	Sarmin HK R-401915-IPAK-6ECD0A1042 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Tetap pertahankan layanan yang sudah baik
23	Deby F Fauzi R-401915-IPAK-ED93327DC7 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Terus tingkatkan pelayanan yang sudah baik
24	Surachman R-401915-IPAK-6B0AB1E979 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Pelayanan sangat baik
25	Rizky Putradinata R-401915-IPAK-35953666A8 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Tetap pertahankan pelayanan yang sudah baik
26	Anton Kurniawan R-401915-IPAK-0425140DBF PENGADILAN NEGERI CIKARANG	PN Cikarang mantap
27	Uman Abdul Rohman R-401915-IPAK-F2D10490E2 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Kesannya pelayanannya ramah dan cepat sekali
28	Muhammad Wilson Alfarozi R-401915-IPAK-247B4C1F7D PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Pelayanan cepat dan jelas
29	Sugandi R-401915-IPAK-15F77E8E0D PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Pelayanannya ramah dan baik
30	Takkas Marholong Sitio R-401915-IPAK-37AF3A1EF4 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Pertahankan terus pelayanan yang baik
31	Sunardi,S.H.,M.H R-401915-IPAK-2327688E72 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Pelayanan di Pengadilan Negeri Cikarang sangat nyaman tidak seperti PN yang lain
32	Anisa R-401915-IPAK-C67EB42DDC PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Layanan pidana terbaik
33	Sunardi R-401915-IPAK-AF3F54E7B8 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Sangat ramah dan baik
34	Danang Sukarmanto,S.H R-401915-IPAK-737CF207DB PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Pelayanan cepat mantapp
35	Datang Sukarmanto Sh R-401915-IPAK-C8E9D0B0BD PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Selalu memberikan yang terbaik

36	Ari Priya Sudarma R-401915-IPAK-C965719752 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Pelayanan Prima dan Cepat
37	Natanael Mite Tlmun, SH R-401915-IPAK-20B6E5DB81 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Pelayanan PTSP Cikarang Terbaik
38	Sri Buntilan R-401915-IPAK-6B80B80793 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Pelayanan sangat cepat tanggap dan humanis
39	Imbran Bachtiar Hidayat R-401915-IPAK-D086ADD69B PENGADILAN NEGERI CIKARANG	baik pelayanannya
40	Sunardi R-401915-IPAK-B692363E31 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Sangat baik dan ramah
41	Haris R.P R-401915-IPAK-5CC4250005 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Semangat
42	Tw R-401915-IPAK-A5CAE70F05 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Mantap
43	Anonim R-401915-IPAK-3E2E0AB331 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Mantul
44	Nora R-401915-IPAK-84105B4C87 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	SIPP diaktifkan sis dan bro
45	M. Alexander Weenas, S.H.,M.H. R-401915-IPAK-E186CD6C58 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Sudah Beberapa Kali Kesini Tidak Pernah Berubah. Selalu Keren
46	Hendra R-401915-IPAK-D3EC68804D PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Sangat mudah dan ramah dalam pelayanan
47	Putu. S R-401915-IPAK-54DF595497 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Terima kasih atas pelayanan nya yang sangat membantu
48	Andriyanie R-401915-IPAK-D485553C0D PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Pelayanan Pidana sudah baik sesuai dengan SOP
49	Aster Johntala M, S.H. R-401915-IPAK-668558CFD4 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	PTSP pengadilan negeri cikarang mantap
50	Anonim R-401915-IPAK-277E3E0511 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	PN Cikarang terbaik
51	Astoyo R-401915-IPAK-831D487B2D PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Pelayanan baik kendala untuk parkir agak susah
52	Tama R-401915-IPAK-2E1CDBAC07 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Sangat tanggap
53	Yuda Bakti R-401915-IPAK-20E973E657 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Pelayanan sangat baik
54	Restu R-401915-IPAK-FB57348EB6 PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Selalu memberikan yang terbaik

55	Nurkholis Madjid R-401915-IPAK-0BFD3EDA6E PENGADILAN NEGERI CIKARANG	Mantap
----	--	--------

IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Cikarang diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Cikarang memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3,99 atau 99,95 %**, masuk pada kategori Bersih Dari Korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4,000
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,000
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4,000
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4,000
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4,000
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4,000
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 4,000
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,000
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,982
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,000

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja pengadilan Negeri Cikarang Tahun 2022 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,80 atau masuk pada persepsi Bersih Dari Korupsi Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator **Perbuatan Curang** memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.



PENGADILAN NEGERI CIKARANG

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi 17530
Telp (021) 89977188, Fax (021) 89977189

Website : www.pn-cikarang.go.id, Email : info@pn-cikarang.go.id

NO	NILAI RUANG LINGKUP PELAYANAN										KET
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

JUMLAH	220	220	220	220	220	220	220	220	220	219	220	
NNR Per RL	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,98	4,00	39,982
NNR Tertimbang	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,398	0,400	3,998
IKM Unit Pelayan												99,95